

Setelah Penangkapan Waisul, Warga Dadap Waswas



TANGERANG, KOMPAS — Warga Kampung Baru Dadap, Dadap, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, menyayangkan kasus hukum yang melibatkan Ketua Forum Masyarakat Nelayan Kampung Baru Dadap Waisul Kurnia.

Ditemui di rumahnya di Dadap, Jumat (8/3/2019), tokoh masyarakat Kampung Baru, Sujai, mengatakan, Waisul menyampaikan aspirasi nelayan yang mengaku tidak mendapat sosialisasi terkait proyek pembangunan jembatan penghubung antara pulau reklamasi di kawasan Kampung Nelayan Baru Dadap dan Pulau C di Jakarta Utara. Penangkapan Waisul ini membuat warga khawatir.

"Secara pribadi, Waisul boleh ikhlas dengan semua ini, tetapi ini preseden buruk buat kami yang ingin belajar berdemokrasi," kata Sujai.

Berdasarkan surat dari Kepolisian Daerah Metro Jaya,

Waisul ditangkap untuk menjalani pemeriksaan karena diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian melalui media elektronik terhadap perusahaan pembangun jembatan pada Juli 2018.

Ini terkait komentar Waisul yang mempertanyakan sosialisasi proyek jembatan penghubung Dadap-Pulau C sepanjang 5 kilometer, yang 900 meter di antaranya dibangun di wilayah Kabupaten Tangerang.

Waisul dipanggil polisi untuk pertama kali pada 2 Oktober 2018. Pada November 2018, Waisul ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan gelar perkara. Waisul dijemput polisi di kediamannya pada Rabu (6/3) dan dipulangkan Kamis tengah malam.

Sujai menerangkan, nelayan Kampung Baru tidak dalam posisi menolak ataupun meneri-

ma jembatan tersebut. Mereka hanya resah pembangunan proyek itu mengganggu hilir mudik perahu dan kapal nelayan di muara Dadap. Di kampung ini terdapat sekitar 1.000 nelayan yang menggunakan 400 perahu berbagai ukuran.

Saat ditahan polisi, Waisul mengaku mendapat sekitar 30 pertanyaan. Secara garis besar, penyidik ingin mengetahui benar atau tidaknya Waisul berkomentar dalam video yang diunggah oleh salah satu media dalam jaringan.

Berdasarkan pantauan dari Dermaga, di muara Dadap terdapat satu tongkang. Sejumlah pekerja terlihat berada di dekat lokasi yang dibuat jembatan tersebut.

Waisul menolak mengomentari hal ini lebih lanjut. Ia ingin fokus dengan kasus hukum yang sedang dihadapi dan tidak ingin menimbulkan polemik baru. "Mudah-mudahan ada ru-

ang komunikasi tim kuasa hukum kami dan pihak pelapor. Harapannya bisa diselesaikan secara kekeluargaan," katanya.

Sejumlah warga Kampung Dadap pun tidak mau berkomentar terkait hal ini. Seorang warga yang tinggal di samping rumah Waisul bahkan mengaku tidak tahu alasan Waisul ditangkap. "Enggak *ngerti*," kata warga itu singkat.

Hal ini segendang sepenuhnya dengan pesan yang disampaikan Waisul kepada warga setelah dirinya ditangkap. "Ketika ada informasi yang belum jelas kebenarannya, konfirmasi dulu," katanya.

Berizin

Dihubungi secara terpisah, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan, perusahaan yang mengerjakan pembangunan jembatan penghubung sudah dilengkapi izin.

"Yang bersangkutan (Waisul) mengatakan di media cetak, media sosial, dan media daring bahwa pengerjaan jembatan penghubung itu tanpa konsultasi publik. Pernyataan itu yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya," ujar Argo.

Argo menambahkan, kuasa hukum Waisul menggugat praperadilan Polda Metro Jaya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 26 Februari 2019. Namun, gugatan tersebut ditolak.

Kuasa hukum Waisul, Marten Siwabessy dari Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi, di Markas Polda Metro Jaya, Kamis malam, mengatakan, pernyataan Waisul di media massa tidak menyebutkan nama perusahaan tertentu. Meski begitu, Waisul akan kooperatif dan mengikuti proses hukum.

Marten berharap ada komunikasi antara PT KNI dan forum nelayan. (E10/E22)